



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PARIWISATA
KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PADA MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 22-24 NOVEMBER 2021

I. PENDAHULUAN

Mandalika sebagai destinasi super prioritas yang dikembangkan dan dikelola oleh BUMN yaitu PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau *Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)*, dengan luas 1.175 hektar, yang terletak di bagian selatan Pulau Lombok dengan lebih dari 16 km pantai pasir putih yang berkilau, mengusung tema destinasi Pariwisata Mandalika yaitu *eco wisata* dan *sport entertain/sport tourism* dimana di Mandalika terdapat *Internasional Street Circuit* harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM Pariwisata agar masyarakat secara maksimal juga dapat berpartisipasi dalam berbagai event yang diselenggarakan di Mandalika.

Banyak agenda event di Mandalika diantaranya yang berskala internasional seperti *World Superbike Mandalika 2021*, MotoGP, Iron Man, Letape Indonesia, dan Rinjani 100 akan dipadukan antara pariwisata (alam) dan olahraga. Dalam menghadapi banyak event internasional ini perlu diantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul seperti sengketa lahan, kekurangan marshal di sirkuit, dan yang viral terkait pembukaan box motor pembalap, banjir di sekitar arena sirkuit, kurangnya fasilitas tempat menginap, transportasi dan lain-lain agar pelaksanaan event berskala internasional di Mandalika dapat sukses dalam berbagai aspek termasuk membawa nama baik citra Indonesia di mata dunia.

Berbagai event ini diharapkan dapat bersinergi dengan pengembangan desa wisata maupun kampung tematik dimana Destinasi pariwisata Mandalika agar Jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan untuk menjadi daya tarik pariwisata selain dapat juga sebagai upaya pelestarian budaya, termasuk gagasan dari Komisi X DPR RI yang mendorong adanya destinasi baru seperti dunia fantasi dalam *sport tourism* agar pariwisata di Mandalika semakin memiliki daya Tarik dengan tidak hanya mengandalkan event-event. Dengan telah berakhir suksesnya event *World Superbike Mandalika 2021* di Mandalika Komisi X DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pariwisata di Mandalika untuk melakukan pengawasan agar wisata pasca event tetap dapat sukses secara berkesinambungan agar pariwisata di NTB dapat bangkit dari pasca bencana dan pasca pandemik COVID 19 dan diproyeksikan akan menjadi *core economy* dan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia khususnya di NTB.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, dan 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
3. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
4. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara.
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI.
 - b. Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan.
 - c. Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.
7. Keputusan rapat intern Komisi X DPR RI tanggal 2 November 2021.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kunjungan kerja bidang pariwisata ini meliputi:

1. Kebijakan dan strategi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam proses pengembangan destinasi super prioritas Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pengembangan desa wisata pasca bencana dan pasca pandemi COVID 19.
2. Kebijakan dan strategi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat setelah sukses melaksanakan event *World Superbike Mandalika 2021* dan persiapan dalam pelaksanaan event-event internasional lainnya dalam waktu dekat seperti event MotoGP.
3. Partisipasi para pemangku kepentingan pariwisata dan organisasi/lembaga bidang pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Peran perguruan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pengembangan destinasi super prioritas Mandalika Nusa Tenggara Barat.

C. Kegiatan

Kegiatan selama kunjungan kerja spesifik yaitu:

1. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dihadiri oleh:
 - a. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - b. Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - c. Wakil Bupati Lombok Tengah
 - d. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - e. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - f. Direktur PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) / *Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)*.
 - g. Direktur Politeknik Pariwisata Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - h. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - i. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - j. Ketua ASITA Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - k. Ketua Puteri Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tenggara Barat bahkan dengan destinasi wisata di Bali dan Labuan Bajo NTT.

- d. Adanya dukungan dari OPD/Lembaga lain dengan adanya penetapan DPSP Mandalika turut serta mendukung pemenuhan 3A sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Misalnya pembukaan jalur transportasi yang terkoneksi antar destinasi wisata, pengembangan tempat transportasi umum seperti bandara, terminal, dan pelabuhan, pembukaan kantor imigrasi seperti di Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Permasalahan

Permasalahan kepariwisataan dan tantangan dilapangan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) / *Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)*, serta para pemangku kepentingan pariwisata lainnya, antara lain:

1. Perlunya antisipasi dalam menghadapi event yang lebih besar dari *World Superbike Mandalika 2021* yang akan datang yaitu MotoGP terutama terkait ketersediaan penginapan, transportasi, dan penguatan SDM pariwisata di provinsi Nusa Tenggara Barat mengingat saat ini dalam event *World Superbike Mandalika 2021* kapasitas yang dimiliki belum cukup menampung banyaknya minat wisatawan yang datang ke Mandalika apalagi kedepan dalam event MotoGP yang diprediksi 10 kali lipat lebih banyak.
2. Permasalahan atau kendala dari pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Mandalika sebagai Destinasi Super Prioritas diantaranya:
 - a. Pelibatan masyarakat dihadapkan pada kendala kemampuan SDM masyarakat untuk menangkap peluang yang tercipta dari adanya pengembangan DPSP Mandalika.
 - b. Keterbatasan akses modal dan teknologi.
 - c. Kurang maksimalnya investasi swasta karena terkendala pada status lahan dan dukungan aksesibilitas ke lokasi investasi.
 - d. Adanya potensi invesasi yang tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bahkan dapat merugikan kondisi daerah sendiri.

III. PEMBAHASAN

A. Pandangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ITDC, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Perguruan Tinggi, dan pemangku pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bela dan Beli Produk Lokal akan belum mampu memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dunia pariwisata sehingga dengan regulasi ini dapat lebih kuat memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ITDC, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan terima kasi kepada Pemerintah yang telah melakukan pembangunan sirkuit Mandalika sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat di NTB.
3. Event *World Superbike* Mandalika 2021 yang baru saja berakhir telah mampu menumbuhkan perekonomian dengan perputaran uang senilai 500 miliar sehingga pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai bangkit kembali setelah terpuruk pasca gempa tahun 2018 dan pandemi COVID 19.
4. Kesiapan dalam penerapan adaptasi baru (*new normal*) dan penerapan *Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability* (CHSE) di Mandalika telah memberikan peluang dalam industri pariwisata untuk dapat dibuka kembali. Selama masa pandemi dengan adanya pembatasan telah menjadikan Desa Wisata sebagai destinasi alternatif untuk berwisata. Penggalakan zona hijau yang salah satunya melalui penerapan protokol COVID 19 dan sertifikasi CHSE pada destinasi pariwisata dengan capaian sertifikasi CHSE industri pariwisata sebagai berikut:

No	Kawasan	Verifikasi	Sudah Menerima Sertifikat	Belum Menerima Sertifikat
1.	Kawasan Gili Matra	117	117	0
2.	DSP Mandalika	122	122	0
3.	Kawasan Sembalun	58	58	0
4.	Kabupaten Sumbawa Barat	1	1	0
5.	Kabupaten Sumbawa	6	6	0
6.	Kabupaten Bima	5	5	0
7.	Kota Mataram	1	1	0
	Jumlah Total	310	310	0

5. Kesiapan mitigasi bencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengingat Indonesia merupakan daerah sirkum pasifik yang rawan bencana belajar dari peristiwa gempa 2018 di Lombok maka seluruh komponen masyarakat NTB dapat merencanakan pembangunan dengan konsep mitigasi bencana, diantaranya dengan melakukan pelatihan mitigasi bencana kepada pelaku pariwisata dan pengelola desa wisata (Pokdarwis) serta mendorong seluruh industri pariwisata dan pengelola destinasi melengkapi papan informasi bencana, fasilitas Gedung yang tahan gempa serta membuat SOP penanganan bencana bagi seluruh wisatawan.
6. Dampak dari pengembangan DPSP Mandalika tidak hanya pada pengembangan Kawasan dan destinasi namun memiliki beberapa aspek utama pengembangan pariwisata paling tidak pada 2 hal yaitu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dapat tergambar dalam tabel sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Ket
1.	2016	3.096.437	
2.	2017	3.761.686	
3.	2018	2.812.379	Gempa
4.	2019	3.706.353	
5.	2020	400.595	COVID 19

Sedangkan dampak terhadap kebutuhan SDM pariwisata juga turut meningkat dan saat ini capaian sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara barat sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Tersertifikasi				Total
		Mandiri	Subsidi BNSP	Fasilitasasi Kemenparekraf	Pemerintah Daerah	
1.	2019	94	500	800	34	1428
2.	2020	119	400	200	-	719
3.	2021	15	200	300	67	582

Selain itu, pengembangan industri kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah teridentifikasi dan dibina oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB pada Tahun 2021 mencapai jumlah sebanyak 2.442 pelaku ekonomi kreatif yang meliputi sub sektor ekonomi kreatif dengan sektor kuliner dan kerajinan memiliki proporsi terbesar.

7. Terkait dukungan pengembangan industri dan kelembagaan termasuk SDM di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, dukungan dari Pemerintah baik itu Kemenparekraf RI, Kemenpupera RI, Kemenpora RI, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan pihak swasta yang dilakukan dengan dana CSR.
 8. Presiden RI Bapak Jokowi mengamanatkan agar sirkuit Mandalika pada tahun 2023 mampu menjadi tuan rumah F1.
 9. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan agar sirkuit Mandalika tidak hanya mengandalkan event pertandingan untuk menarik kunjungan wisatawan namun juga perlu pengembangan kegiatan pariwisata diantaranya desa wisata, sedangkan terkait permasalahan lahan pemerintah daerah sudah menyediakan 2 hektar untuk Desa Wisata untuk 121 KK yang disiapkan home stay dan rumah pribadi dari Kemenpupera, sedangkan terkait banjir hal tersebut terjadi karena proses pembangunan masih sedang berlangsung namun untuk arena sirkuit Mandalika sudah sesuai standar internasional sehingga jika hujan air akan mengalir ke luar arena langsung kelaut.
 10. Direktur Poltek Pariwisata Lombok menyampaikan bahwa sejak berdiri sudah menghasilkan lulusan sebanyak 314 tahun 2020 dan 340 tahun 2021 sehingga berjumlah 654 SDM yang saat event *World Superbike* Mandalika sudah dapat memperkuat SDM Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk juga lulusan dari SMK.
 11. PHRI Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan bahwa saat ini event yang diadakan di Mandalika sudah mampu membangkitkan pariwisata setelah terdampak gempa dan pandemi COVID 19.
- B. Pandangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI diantaranya sebagai berikut:
1. Mengapresiasi komitmen, strategi dan langkah-langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung kebijakan pengembangan destinasi super prioritas Mandalika.
 2. Mengapresiasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/*Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC), sebagai BUMN yang ditunjuk untuk mengelola kawasan wisata Mandalika, yang

telah melakukan upaya dan program-program pengembangan pariwisata di Mandalika, termasuk dalam mensukseskan acara *World Superbike Mandalika 2021* dan upaya mempersiapkan event MotoGP tahun 2021 di Sirkuit Mandalika.

3. Mendukung upaya antisipasi permasalahan menjelang event MotoGP terkait keterbatasan penginapan untuk bersinergi dengan hotel-hotel di Bali termasuk transportasi baik udara ketersediaan jadwal pesawat, darat ketersediaan damri, dan laut ketersediaan kapal.
4. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata superprioritas Mandalika harus melibatkan unsur masyarakat dan asosiasi lembaga/organisasi pariwisata, serta harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan SDM dan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, tempat-tempat tertentu di kawasan Mandalika juga harus memberikan ruang terhadap pengembangan industry kreatif dan ruang pengembangan bagi kelompok milenial termasuk pengembangan desa wisata.
5. Terkait permasalahan pariwisata yang ditemukan di destinasi pariwisata Mandalika perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasinya dengan melakukan koordinasi dengan K/L terkait dan melibatkan para pemangku kepentingan pariwisata di daerah, khususnya dalam mendukung sukses event MotoGP 2021 agar dapat lebih siap dan sukses dari event *World Superbike Mandalika 2021*.
6. Mendukung pengembangan destinasi pariwisata Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan tema yang diusung yaitu *eco tourism*, *sport tourism* dan *sport entertainment*, dan mendorong pembangunan serta pengembangan destinasi wisata Mandalika seperti dunia fantasi dalam bentuk sport agar tidak hanya mengandalkan event dalam menarik kunjungan wisatawan.
7. Mendorong agar pariwisata super prioritas Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki dampak positif terhadap ekonomi kerakyatan dan peningkatan SDM masyarakat NTB.
8. Mendorong agar promosi destinasi pariwisata Mandalika untuk terus ditingkatkan pelaksanaan even-even nasional dan internasional, agar tingkat kunjungan wisatawan ke Mandalika terus mengalami peningkatan.
9. Mendorong perlunya sinergitas tupoksi Mandalika tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenparekraf RI, namun juga perlu sinergitas dengan Kemenpora RI, dan Kemendikbudristek RI, Kemenpupera serta BUMN.

IV. USULAN DAN PERMOHONAN DUKUNGAN

Secara umum, dalam pertemuan dan kunjungan lapangan, terdapat beberapa usulan dan masukan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/*Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)*, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan Pariwisata seperti PHRI dll menyampaikan usulan dan permohonan dukungan diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/*Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)* mengusulkan perlunya dukungan promosi event pariwisata di Mandalika kepada Kemenparekraf RI dan dapat

diteruskannya sinergitas antar K/L dan BUMN untuk pengembangan Kawasan KEK Mandalika.

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan permohonan:
 - a. Dukungan Pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata di Mandalika dengan pengembangan Kawasan-kawasan yang terintegrasi dan terkait dengan DPSP Mandalika sehingga koneksi pengembangan antar Kawasan akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam skala nasional dan internasional agar lebih banyak dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memanfaatkan fasilitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) yang ada.
 - c. Penguatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata NTB, antara lain melalui pengembangan Politeknik Pariwisata Lombok dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di NTB.
 - d. Pengembangan Mandalika harus memperhatikan kearifan lokal agar menjadi daya Tarik bagi Kawasan serta menjadi identitas keunggulan pariwisata di NTB.
3. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan agar Destinasi KEK Mandalika tidak hanya mengandalkan event pertandingan olahraga untuk menarik kunjungan wisatawan namun juga perlu pengembangan kegiatan pariwisata dan destinasi wisata pendukung lainnya diantaranya desa wisata agar kunjungan wisatawan merata ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

V. KESIMPULAN

Dalam kunjungan kerja spesifik bidang pariwisata ke Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Destinasi pariwisata super prioritas Mandalika telah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari sisi infrastruktur, transportasi, penginapan dan penguatan SDM Pariwisata, hal ini terlihat dari suksesnya event *World Superbike* Mandalika 2021 yang baru berakhir mampu membangkitkan pariwisata dan ekonomi masyarakat setelah terpuruk oleh gempa dan pandemi COVID 19.
2. Dalam mendukung penyelenggaraan MotoGP 2021 di Mandalika, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
 - a. persiapan dan strategi langkah antisipasi keterbatasan penginapan dan transportasi perlu melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bali dan sekitarnya agar mampu menampung wisatawan yang diprediksi 10 kali lipat lebih banyak dari event *World Superbike* Mandalika 2021.
 - b. Masih ditemukannya permasalahan lahan dan banjir dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata Mandalika, namun sudah diantisipasi oleh Pemerintah Daerah dengan penyediaan lahan seluas 2 hektar yang akan digunakan oleh satu dusun sebanyak 151 KK, terkait pembangunan dan pengembangannya akan dilakukan oleh Kemenpupera dengan mewujudkan destinasi desa wisata dan rumah untuk menampung masyarakat tersebut, sedangkan masalah banjir tidak terjadi di arena sirkuit Mandalika sebab sudah mengikuti standar internasional namun banjir yang

- terjadi di luar arena sirkuit Mandalika kedepan akan dilakukan pembenahan secara bersamaan dengan proses pembangunan yang masih berlangsung.
3. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dalam persiapan MotoGP 2021 dengan K/L yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kementerian PUPR RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, serta KemendesPDT RI termasuk dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
 4. Terkait permasalahan kepariwisataan dan persiapan MotoGP 2021, Komisi X DPR RI akan menindaklanjutinya dalam rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi X DPR RI, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kemenpora RI dan Kemendikbudristek RI.

VI. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI berkoordinasi dengan K/L lainnya untuk membantu pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya terkait persiapan event MotoGP yang perlu diantisipasi terkait permasalahan kurangnya kapasitas penginapan, transportasi, penguatan SDM pariwisata, dukungan promosi event dan pariwisata di Mandalika, serta kurangnya sadar wisata bagi masyarakat.
2. Mendorong Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis percepatan pembangunan dan pengembangan destinasi super prioritas KEK Mandalika dengan sinergitas tupoksi Mandalika agar tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenparekraf RI, namun juga menjadi tupoksi bagi Kemenpora RI, Kemendikbudristek RI, dan Kemenpupera serta BUMN.
3. Mendorong Pemerintah untuk terus menciptakan iklim kondusif pemulihan pariwisata agar menjadi *core economy* dan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.

VII. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut pada rapat dengan mitra kerja Komisi X DPR RI.

Jakarta, 25 November 2021

Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Tim,

Ttd.

Dr. Dede Yusuf M.E., S.T. M.I.Pol

A-539